

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh skeptisme profesional auditor terhadap deteksi tindak korupsi yang dilakukan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan data yang diperoleh, terlihat bahwa gambar skeptisme profesional auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan setiap tugas telah diterapkan dengan baik dan efektif. Indikator suspensi pada penilaian mendapat skor tertinggi. Hal ini membuktikan bahwa suspensi pada penilaian telah dilaksanakan, dan dengan melaksanakan setiap tanggung jawabnya, auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga telah menjunjung tinggi integritasnya. Sedangkan skor terendah diperoleh dari indikator pemahaman interpersonal. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman auditor terhadap perilaku perseorangan tidak selalu atau kurang menjadi kebiasaan untuk diperhatikan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya.
2. Pendeteksian tindak korupsi yang dilakukan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah dilaksanakan dengan baik. Dimensi *detection fraud* dengan skor tertinggi adalah indikator memahami proses bisnis atau operasi untuk dipelajari. Sedangkan dimensi *corruption scheme* dengan skor tertinggi adalah indikator pertentangan kepentingan. Hal ini membuktikan bahwa sebagai langkah pertama pendeteksian tindakan kecurangan, memahami proses bisnis atau operasi pihak yang akan diaudit sudah bias dilakukan auditor dalam melaksanakan proses pemeriksaan. Selain itu, bentuk kecurangan korupsi yang biasanyaditemukan auditor

saat melakukan pendeteksian kecurangan adalah pertentangan kepentingan internal klien. Terkadang, hal tersebut kemudian menjadi akibat terjadinya *fraud* dalam internal klien. Skor terendah dimensi *detection fraud* berasal dari indikator gejala *fraud* yang paling mungkin akan terjadi. Sedangkan skor terendah dimensi *corruption scheme* berasal dari indikator pemerasan ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa auditor kurang terampil dalam memprediksi gejala-gejala *fraud* yang mungkin terjadi. Sementara sebagian besar auditor tidak pernah menemukan bentuk korupsi berupa pemerasan ekonomi yang berasal dari pihak eksternal terhadap pihak yang diaudit.

3. Pengujian Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi pada auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat menunjukkan hubungan yang positif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pengaruh Skeptisme Profesional Auditor terhadap Pendeteksian Tindakan Korupsi termasuk dalam kategori sedang. Sehingga semakin efektif penerapan skeptisme profesional auditor oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, maka pendeteksian tindakan korupsi yang dilakukan dalam setiap penugasan akan semakin baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan, auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus lebih meningkatkan dalam pemahaman interpersonal dalam melakukan tugasnya karena indikator ini mendapatkan skor terendah. Ketika seorang auditor mampu memahami perilaku orang lain, maka diharapkan perilaku yang menjadi indikator adanya kecurangan dapat dideteksi lebih dini. Selain itu, BPKP sebagai auditor

independen pemerintah juga harus mendapatkan keyakinan yang memadai dari masyarakat. Untuk memperolehnya, auditor BPKP harus dapat melaksanakan setiap tanggung jawabnya berdasarkan nilai-nilai etika yang berlaku dalam masyarakat. Unsur-unsur Skeptisme Profesional Auditor yang tertuang dalam *International Federation of Accountants* (IFAC) harus dapat diterapkan dengan benar dan merata dalam setiap pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap komponen-komponen skeptisme profesional auditor yang terdapat dalam IFAC tersebut. Jika tidak memperoleh pemahaman yang memadai, pelaksanaan audit yang baik akan sulit tercapai. Selain itu, diperlukan pelatihan khusus untuk menjadikan sikap tersebut meningkat dan dapat dijadikan kebiasaan yang baik bagi auditor BPKP dalam setiap penugasannya.

2. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pada dimensi *detection fraud* skor terendah berasal dari indikator gejala *fraud* yang paling mungkin akan terjadi. Hal ini berarti bahwa auditor BPKP perlu lebih lagi memberikan perhatian pada proses audit sehingga gejala-gejala *fraud* yang paling mungkin akan terjadi dapat dideteksi lebih dini. Disamping itu, salah satu tanggung jawab auditor BPKP dalam Standar Pemeriksa Keuangan Negara (SKPN) adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa salah satu material atau ketidakakuratan yang signifikan dalam data akan terdeteksi. Sehingga pendeteksian kecurangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pemeriksaan/audit. Pendeteksian tindakan korupsi sebagai salah satu pendeteksian kecurangan harus dilakukan auditor BPKP dengan penuh kesungguhan, karena saat ini korupsi merupakan masalah yang cukup menyita perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman auditor atas gejala-gejala *fraud* yang

mungkinakanterjadisangatlahpenting. Pemahaman yang baikakanmemberikanpertimbangan yang maksimalbagi auditor, sehinggaprediksi yang dihasilkanakanmendekatiatausesuaidenganapa yang terjadi di lapangan. Semakintinggipemahaman auditor akangejala-gejala*fraud* yang mungkinterjadi, makasemakinbaikkemampuannyadalammemberikanprediksi. Selainitu, semakinsering auditor melatihpemahamannya, makasemakintepatprediksi yang dihasilkan auditor.

3. Bagipenelitiselanjutnya, penelitimenyarankan agar menambahpopulasipenelitian. Sebelummelakukanpenelitian, adabaiknyamempelajarikebiasaanatausituasikerjadaripopulasipenelitian yang hendakditeliti, sehinggaakanmempermudahdalammemperoleh data. Dalampenelitianinihanyameneliti auditor BPKP PerwakilanProvinsiJawa Barat, sehinggasulituntukdigeneralisirsebagaigambarankeseluruhanyangterjadipada BPKP di seluruh Indonesia. Selainitu, penelitianinijugadapatdilakukandenganmenggunakanpendeteksian*fraud* denganpendekatan audit kasusatau audit investigatifdenganstudipadaKomisiPemberantasanKorupsi (KPK)ataulembaga audit pemerintahlainnya.